

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Fraud sering dikenal dengan istilah kecurangan yang akhir-akhir ini sering dibicarakan di Indonesia. Definisi dari *fraud* itu sendiri yaitu penipuan yang menyebabkan kerugian. *The Institute of Internal Auditor (IIA)*, dalam Sawyer *et.al* (2003:08) mendefinisikan *fraud* sebagai sekumpulan tindakan yang tidak diizinkan dan melanggar hukum yang ditandai dengan adanya unsur kecurangan yang disengaja. *Fraud* juga diartikan dengan penipuan, yang memiliki arti kekeliruan yang disengaja yang menyebabkan seseorang menderita kerusakan. Selain itu, *fraud* juga merupakan bagian dari kejahatan memanipulasi informasi dengan tujuan mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. Biasanya kejahatan yang dilakukan adalah memanipulasi informasi keuangan.

Faktor-faktor yang memengaruhi tindakan *fraud* dapat dikaitkan dengan teori *fraud triangle* yaitu: 1) tekanan, 2) kesempatan dan 3) rasionalisasi yang merupakan faktor yang mendorong seseorang melakukan kecurangan. **Tekanan** merupakan situasi dimana seseorang menyakini bahwa mereka perlu untuk melakukan *fraud*. Tekanan biasanya terjadi karena kondisi kesulitan ekonomi seseorang yang memicu untuk melakukan *fraud*. **Kesempatan** muncul sebagai akibat lemahnya pengendalian internal dalam organisasi itu sendiri, sedangkan **Rasionalisasi** merupakan suatu bentuk pemikiran yang menjadikan seseorang yang melakukan *fraud* merasa bahwa sikap curang tersebut dapat diterima (Amiruddin, 2003).

Menurut Wilopo (2006), *fraud* dapat disebabkan oleh lemahnya pengendalian internal. *Fraud* dapat terjadi baik di sektor privat maupun di sektor

publik. Jika suatu pengendalian internal lemah maka akan mengakibatkan kekayaan atau aset suatu Negara yang dikelola pemerintah daerah tidak terjamin keamanannya, informasi yang ada tidak diteliti dan tidak dapat dipercaya, tidak efisien dan efektifnya kegiatan-kegiatan operasional serta tidak dapat dipatuhinya kebijakan kepala daerah dan perundang-undangan yang ditetapkan. Pengendalian internal merupakan faktor eksternal yang bisa mempengaruhi terjadinya *fraud*.

Selain itu juga terdapat faktor internal yang memengaruhi kecenderungan seseorang melakukan *fraud*. Salah satunya adalah karakteristik personal yang tercermin dalam *locus of control*. *Locus of control* merupakan determinan penting yang menunjukkan cara seseorang menginterpretasikan situasi-situasi yang dihadapi. Individu yang memiliki *locus of control* internal menganggap bahwa keberhasilan atau kegagalan tergantung pada dirinya sendiri, sedangkan individu yang memiliki *locus of control* eksternal menganggap bahwa setiap kejadian berada diluar kontrol dirinya. Menurut Amrizal (2004) bahwa tindakan *fraud* dapat terjadi karena kurangnya kepedulian positif karyawan terhadap perbuatan menyimpang tersebut, artinya rendahnya kepedulian terhadap organisasi akan mendorong pada perilaku tidak etis termasuk *fraud* tersebut.

Selain *locus of control*, Liyanarachi (2009) menemukan bahwa level penalaran moral individu mereka akan mempengaruhi perilaku etis seseorang. Rendahnya moral akan menyuburkan tindakan *fraud* yang pada akhirnya akan merusak bahkan dapat menghancurkan organisasi.

Fraud juga tidak lepas dari pengaruh budaya dalam organisasi itu sendiri. Hal ini karena budaya organisasi berkaitan dengan aspek subjektif dari seseorang dalam memahami apa yang terjadi dalam organisasi sehingga dapat

memberikan pengaruh dalam nilai-nilai dan norma-norma yang melingkupi semua kegiatan bisnis yang mungkin terjadi tanpa disadari. Budaya dianggap memiliki pengaruh yang signifikan pada perilaku seseorang (Apriadi dan Facriyah, 2015).

Budaya organisasi berperan dalam menciptakan perbedaan yang jelas antara satu organisasi dengan organisasi yang lainnya, memberikan ciri identitas bagi anggota organisasi, mempermudah timbulnya komitmen yang lebih luas daripada kepentingan individu, meningkatkan kemantapan sistem sosial, dan memandu atau membentuk sikap anggota dalam suatu organisasi tersebut (Veithzal, 2003). Budaya merupakan norma-norma dan nilai-nilai yang mengarahkan perilaku anggota organisasi. Budaya organisasi memberi kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan perilaku etis, karena budaya organisasi merupakan seperangkat nilai dan norma yang membimbing tindakan karyawan. Budaya dapat mendorong terciptanya perilaku etis, dan sebaliknya dapat pula mendorong terciptanya perilaku yang tidak etis (Sawitri, 2011). Dimensi praktek budaya organisasi diantaranya *people oriented and job oriented*. Jika budaya dalam suatu organisasi berorientasi pada orang (*people*) maka keputusan yang diambil dalam organisasi dibuat secara kelompok. Sebaliknya jika berorientasi pada pekerjaan (*job*) maka segala keputusan lebih sering dibuat secara individu (Hofstede: 1994 dalam <http://geert-hofstede.com/indonesia.html>).

Fraud yang terjadi di sektor publik nantinya akan berdampak pada pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2004 menyatakan bahwa hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Pelayanan kesehatan merupakan

bagian dari pelayanan publik dengan kategori sebagai pelayanan jasa. Bidang layanan kesehatan ini akan mencerminkan kualitas suatu negara. Azas pelayanan publik menurut keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 diantaranya harus akuntabel dan transparan. Jika tidak menerapkan azas tersebut maka diindikasikan akan terjadi *fraud* dalam pelayanan publik itu sendiri.

Pelayanan kesehatan selalu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah di negara manapun. Indikator pertumbuhan suatu negara yang baik salah satunya dilihat dari bidang kesehatan. Jaminan kesehatan yang baik, layanan kesehatan yang baik menjadikan suatu negara bisa dikenal oleh negara manapun. Rakyat/masyarakat di suatu negara dengan indeks kesehatan yang tinggi cenderung memiliki kualitas pendidikan yang tinggi pula (Nuh, 2014). Singapura dengan layanan kesehatannya yang termasuk nominasi negara dengan layanan kesehatan terbaik dan memiliki tingkat kualitas pendidikan yang baik pula, lebih-lebih pada bidang pendidikan kedokteran. Fakta inilah yang menjadikan alasan mengapa sektor kesehatan di suatu negara menjadi bahasan yang menarik untuk dianalisis secara mendalam.

Kecurangan (*fraud*) pada pelayanan kesehatan atau asuransi kesehatan terjadi dikarenakan adanya keterlibatan 3 pihak. Berdasarkan Health Insurance Association of America (HIAA), yaitu: a) *Fraud* oleh pemberi pelayanan kesehatan, b) *Fraud* oleh peserta/pasien, dan c) *Fraud* oleh asuransi kesehatan. Ada indikasi kasus *fraud* yang biasa terjadi pada pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemberi pelayanan kesehatan (dokter, perawat, bidan, apoteker, dan lain-lain). Bentuk *fraud* dalam pelayanan kesehatan diantaranya, manipulasi diagnose, memasukkan tanggal dan lama masa perawatan, penagihan tindakan medik yang tidak sesuai, jumlah obat yang diberikan pada pasien tidak sesuai.

Fraud oleh peserta atau pasien meliputi penggunaan asuransi kesehatan yang tidak sesuai peserta dan merubah tagihan klaim, sedangkan kasus *fraud* yang dilakukan oleh pihak asuransi sendiri seperti melakukan klaim yang fiktif, adanya peserta yang fiktif, dan penggelapan premi atau iuran.

Kasus *fraud* pada pelayanan kesehatan banyak menjadi sorotan, diantaranya yang dilakukan oleh RSUD dr. Moewardi dan RSIS Yarsis. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelisik dugaan penyelewengan dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di RSUD dr Moewardi dan RSIS Yarsis. Pasalnya, terdapat kesenjangan nilai antara biaya rumah sakit dengan nilai yang diklaimkan ke BPJS.

(<http://www.solopos.com/2014/03/22/dana-bpjs-rsud-dr-moewardi-dan-rsis-yarsis-disorot-kpk-497728>).

MENPAN No. 63/ KEP/ M. PAN/ 7/ 2003 menyebutkan bahwa ada 3 jenis pelayanan publik yaitu: pelayanan administratif, pelayanan jasa, dan pelayanan barang. Kasus *fraud* pelayanan administratif dalam pelayanan kesehatan meliputi layanan ditagih pada tingkat tinggi yang tidak normal dibandingkan dengan biaya, tagihan untuk pasien yang tidak memberikan manfaat dari program perawatan kesehatan, tagihan melebihi dari resep dokter, tagihan untuk pengobatan yang tidak perlu dan suap diberikan kepada dokter yang meresepkan. Kasus *fraud* pelayanan jasa dalam pelayanan kesehatan dilakukan oleh para oknum pemberi jasa pelayanan meliputi manipulasi diagnosa, jumlah obat yang tidak sesuai, kasus malpraktik. Kasus *fraud* pelayanan barang yaitu penipuan Scooter (penagihan untuk kursi roda bertenaga listrik yang tidak perlu) dan transportasi ambulans dapat mencakup tagihan untuk

jarak tempuh lebih dari yang dikeluarkan atau untuk perjalanan yang tidak tercakup oleh program kesehatan.

Di Indonesia khususnya baru-baru ini mencoba menerapkan suatu sistem layanan kesehatan yang terintegrasi secara nasional. Jaminan kesehatan yang paling mutakhir dikeluarkan oleh pemerintah di Indonesia adalah BPJS Kesehatan. Jaminan kesehatan ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2014 dan dikenal dengan nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) saat ini sudah mengelola dana tidak kurang sekitar Rp. 40 Triliun per tahunnya. Dana yang cukup besar yang dikelola BPJS ini merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat dan sebagian berasal dari pemerintah yang digunakan untuk operasionalisasi layanan kesehatan untuk masyarakat secara luas.

Beberapa penelitian terdahulu terkait dengan variabel dalam penelitian ini yaitu *locus of control*, moralitas individu, dan *job and people oriented* dan pengaruhnya terhadap fraud telah banyak dilakukan. Sofyani (2012) meneliti tentang otoritas atasan, retaliasi dan *locus of control* sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manipulasi dalam Laporan Realisasi Anggaran. Hasil dari penelitian ini terbukti bahwa otoritas atasan dapat melakukan kecurangan, ditambah lagi adanya ancaman (retaliasi) dari atasan jika perintah tidak dilakukan cenderung akan menjadikan seseorang berperilaku tidak etis, yakni membuat laporan realisasi anggaran yang tidak sesuai. Kuswati (2013) juga menguji tentang pengaruh *locus of control* terhadap kinerja karyawan. Hasil uji menunjukkan bahwa *locus of control* berpengaruh signifikan terhadap kinerja individu. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat *locus of control* dan kinerja karyawan adalah baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sedangkan Popoola

(2011) meneliti tentang pengaruh locus of control dan kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi *locus of control* dan kepuasan kerja secara signifikan mempengaruhi komitmen organisasi. Dali (2013) juga meneliti hubungan antara *locus of control* dengan kepuasan kerja yang dimoderasi oleh spiritualitas. Hasil studi menunjukkan hubungan yang signifikan. Kepuasan kerja dan komitmen organisasi akan berdampak pada tindakan fraud seseorang.

Moralitas individu dianggap dapat mempengaruhi perilaku tidak etis. Dewi (2014) meneliti tentang moralitas dan sistem pengendalian internal (SPI) pada kecurangan akuntansi. Hasil studi menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kecenderungan melakukan kecurangan akuntansi antara individu yang memiliki level penalaran moral rendah dan level penalaran moral tinggi. Kurniawan (2008) juga menguji pengaruh moralitas, motivasi, dan sistem pengendalian internal dengan menggunakan variabel dependen kecurangan pada laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Moralitas aparatur pemerintah berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan pemerintah daerah Kota Solok, Motivasi negatif dari aparatur pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan pemerintah daerah Kota Solok, dan Sistem pengendalian intern aparatur pemerintah berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan pemerintah daerah Kota Solok. Selain itu, Goodstein (2000) juga meneliti tentang *Moral Compromise And Personal Integrity: Exploring The Ethical Issues of Deciding Together In Organizations*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gagasan Goodstein tentang moral individu dapat

memperkuat integritas pribadi dan dapat mendukung pengembangan individu yang responsif.

Penelitian Charless (2010) tentang *People and Organizational Culture: A Profile Comparison Approach to Assessing Person Organization Fit*. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengkaji interaksi antara sesama karyawan perusahaan melalui sebuah instrument budaya organisasi. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa pentingnya memahami pribadi seseorang agar terciptakesesuaian antara kepentingan individu dan budaya organisasi itu sendiri, sehingga adanya keselarasan tujuan tersebut akan mengurangi perilaku menyimpang dari individu dalam organisasi.

Berdasarkan hasil kajian teoritis di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji kembali pengaruh locus of control, moralitas individu dan job and people oriented terhadap kecenderungan perilaku fraud pada pelayanan kesehatan. Studi ini mengambil objek di Kabupaten Bangkalan mengingat munculnya pemberitaan adanya kasus ketidakpuasan terhadap layanan kesehatan di wilayah tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan kajian penelitian/bukti empiris yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah penelitian adalah:

1. Apakah *locus of control* berpengaruh signifikan terhadap *fraud* pelayanan kesehatan?
2. Apakah moralitas individu berpengaruh signifikan terhadap *fraud* pelayanan kesehatan?

3. Apakah *job and people oriented* berpengaruh signifikan terhadap *fraud* pelayanan kesehatan

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah *locus of control* berpengaruh signifikan terhadap *fraud* pelayanan kesehatan
2. Untuk mengetahui apakah moralitas berpengaruh signifikan terhadap *fraud* pelayanan kesehatan
3. Untuk mengetahui apakah *job and people oriented* berpengaruh signifikan terhadap *fraud* pelayanan kesehatan

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diberikan oleh penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menginspirasi para pemberi pelayanan kesehatan agar dapat menghindari *fraud* pelayanan kesehatan
2. Bagi akademisi, penelitian diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pengembangan ilmu akuntansi, khususnya akuntansi forensik di masa mendatang
3. Bagi praktisi, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam mengelola sumber daya manusia pada umumnya dan para pengelola RSUD Bangkalan pada khususnya.
4. Bagi lembaga, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam menentukan kebijakan-kebijakan dalam peningkatan kinerja sesuai standar

pelayanan kesehatan, sehingga kualitas pelayanan yang diberikan dapat semakin ditingkatkan.